

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023**



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2024**



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk itu ditetapkan sasaran strategis Sekretariat DPRD tahun 2023-2026 yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, yaitu **“Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD”** dengan indikator **Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Point)** pada tahun 2023 dengan target kinerja 95,00 Point, capaian kinerja Sekretariat DPRD adalah 95,00 Point. Sesuai dengan target sasaran strategis yang telah ditetapkan, sehingga realisasi sasaran strategis Sekretariat DPRD Tahun 2023 adalah sebesar 100%.

Table 1

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	%
			2023	2023	
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Point)	95,00	95,02	100,02 %

Sumber Data : Diolah Tim Tahun 2024

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tidak lepas dari kerjasama baik antar bagian di dalam Sekretariat DPRD atau dengan perangkat daerah yang lain.



Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LKjIP Sekretariat DPRD Tahun 2023 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini, diucapkan terima kasih

Liwa, Januari 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PIRWAN, SE., MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690310 199803 1 006



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD didukung oleh ketersediaan anggaran yang tertuang dalam APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023. Sekretariat DPRD tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp.37.360.246.766,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) terealisasi sebesar Rp.36.800.091.750,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 98,50 % (Sembilan puluh delapan koma lima puluh persen).

Dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 telah ditetapkan tujuan yaitu “Terwujudkan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas” dengan sasaran yang ditetapkan yaitu “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD” dengan indikator Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Point) dengan target kinerja 95,00 Point dan terealisasi 95,02 Point atau sebesar 100,02 %.

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang diamanatkan penugasannya kepada Kepala Bagian dan Kepala sub bagian ataupun pejabat fungsional tertentu melalui Perjanjian Kinerja.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, terdapat perubahan baik itu penambahan atau pengurangan anggaran, penambahan sub kegiatan ataupun penambahan target kinerja sub kegiatan, yang menyebabkan adanya Perubahan Perjanjian Kinerja. Perubahan ini salah satunya disebabkan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, sehingga terdapat penambahan sub kegiatan yang semula tidak dianggarkan yaitu sub kegiatan Medichal Chek Up bagi anggota DPRD dan hal-hal lain seperti penambahan beban kerja DPRD sehingga perlunya penambahan volume sub kegiatan.

Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 yang baik dan memuaskan ini salah satunya karena adanya dukungan aparatur Sekretariat DPRD yang sudah



bekerja dengan optimal. Walaupun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD baik dari internal maupun dari eksternal.

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024, dikarenakan pada tahun tersebut akan terdapat pelantikan anggota DPRD hasil pemilihan Umum Tahun 2024 maka akan terdapat beberapa sub kegiatan/kegiatan yang bertambah. Dimana kegiatan/sub kegiatan ini hanya muncul ketika ada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif.

Liwa, Januari 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PIRWAN, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690310 199803 1 006



DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR DIAGRAM	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	2
C. Struktur Organisasi	2
D. Peran Strategis Perangkat Daerah	3
E. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Perangkat Daerah	5
1. Strategi dan Arah kebijakan	6
2. Program dan Kegiatan Pembangunan	9
B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	9
C. Target Kinerja Tahun 2023 Menurut Renstra	13
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	
A. Analisis Sumber Daya Manusia	15
B. Analisis Sarana dan Prasarana	16
C. Analisis DPA Tahun Anggaran 2023	17
D. Peran Strategis Perangkat Daerah	3
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	19
B. Perbandingan Kinerja	22
1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelum	22
2. Perbandingan Pencapaian IKU Sekretariat DPRD Tahun 2023 dengan Sekjen DPR RI	23
3. Perbandingan Pencapaian IKU Sekretariat DPRD Th. 2023 dengan Sekretariat DPRD Prov. Lampung ..	24



4. Benchmarking	24
C. Realisasi Anggaran	25
D. Pemanfaatan Laporan Kinerja	28
E. Survey Kepuasan Anggota DPRD Kab. Lampung Barat ..	29
BAB IV PENUTUP	30

LAMPIRAN

- Lampiran I : Rencana Aksi Kinerja Per Kegiatan
- Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Perubahannya
- Lampiran III : Dokumentasi Kegiatan Pembangunan
- Lampiran IV : Daftar Penghargaan



DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kab. Lampung Barat Tahun 2023	i
Tabel 2	Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD	6
Tabel 3	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Sekretariat DPRD	7
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kab. LB Tahun 2023	10
Tabel 5	Rekapitulasi Anggaran dari Sekretariat DPRD yang tertuang dalam RENJA, PK dan Perubahan PK 2023	12
Tabel 6	Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026	13
Tabel 7	Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2017-2022	14
Tabel 8	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Tabel 9	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Tabel 10	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	16
Tabel 11	Rekapitulasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2023	18
Tabel 12	Capaian Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kab. Lampung Barat Tahun 2021-2022	20
Tabel 13	Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan 2022	22
Tabel 14	Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kab. LB Tahun 2023	26



DAFTAR DIAGRAM

HALAMAN

Diagram 1 Capaian Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2023	19
Diagram 2 Perbandingan Target dan Serapan Anggaran	28



DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kab. Lampung Barat	3
Gambar 2 Peta Bisnis Sekretariat DPRD Kab. Lampung Barat	21



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat DPRD selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan dengan memperhatikan keselarasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sasaran strategis dengan target kinerja yang telah ditetapkan.



B. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dibentuk terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan informasi, kehumasan dan keprotokolan DPRD;
- e. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- f. penyelenggaraan dokumentasi dan publikasi produk hukum DPRD; dan
- g. penyelenggaraan penyusunan produk hukum DPRD dan bahan kajian rancangan peraturan daerah.

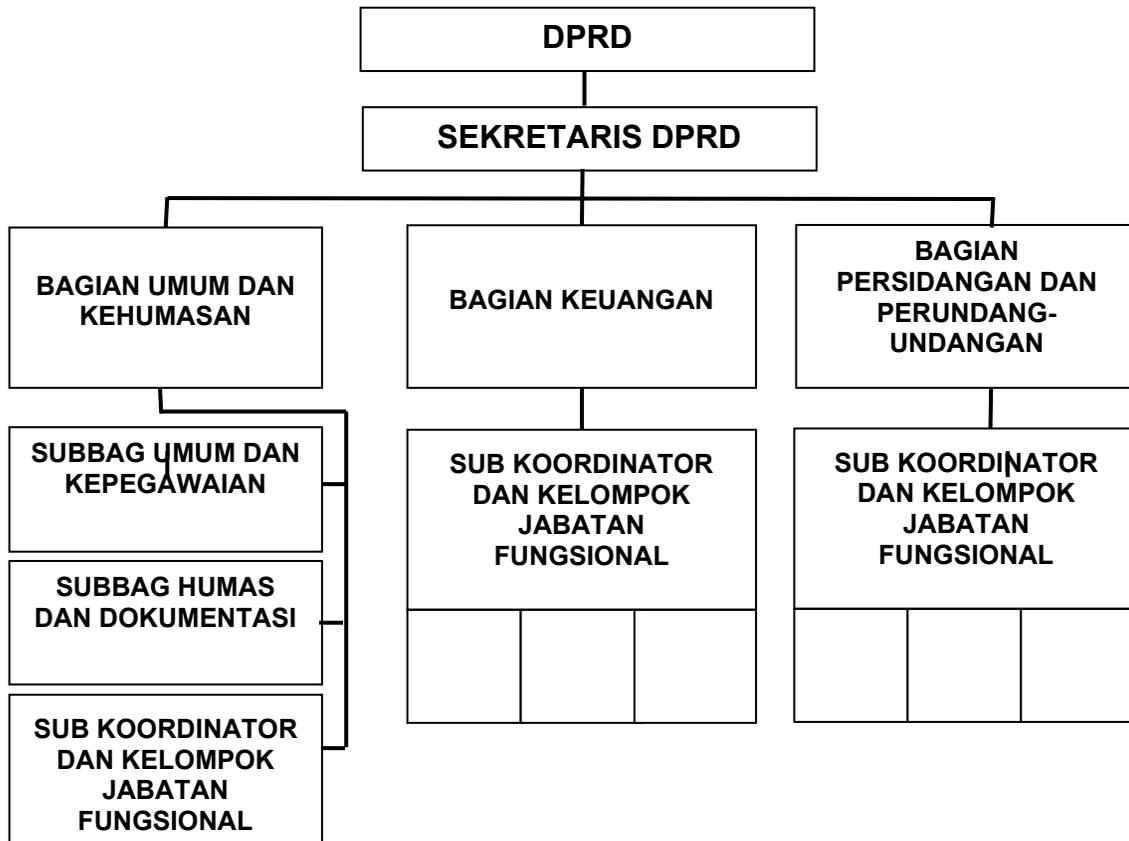
C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagai berikut:

- a. **Sekretaris DPRD;**
- b. **Bagian Umum dan Kehumasan membawahi:**
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Humas dan Dokumentasi.
 3. Jabatan Fungsional.
- c. **Bagian Keuangan**
Membawahi kelompok Jabatan Fungsional.
- d. **Bagian Persidangan dan Perundang-undangan**
Membawahi kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Sumber : JDIIH Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.

D. Peran Strategis Perangkat Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa DPRD dan kepala daerah dalam hal ini yaitu Bupati memiliki hubungan kerja yang bersifat kemitraan yang berarti tidak saling membawahi karena mengingat kedudukan keduanya yang sejajar. DPRD sebagai lembaga legislatif yang merupakan wakil rakyat dalam penyampaian aspirasinya, dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD dituntut berperan aktif dalam pelaksanaannya karena hal tersebut merupakan



salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sehingga apabila dilihat dari tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tersebut, Sekretariat DPRD memiliki peran strategis sebagai pemberi pelayanan kepada anggota DPRD kabupaten Lampung Barat dan sebagai penghubung / koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah daerah.

Dengan berhasilnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD maka pelaksanaan pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan baik.

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD yang diuraikan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026 ini merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD di masa yang akan datang.

Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat, maka isu-isu tersebut dituangkan ke dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
- b. Ketersediaan ruang publik sebagai bagian dari upaya menyediakan ruang aspirasi masyarakat;
- c. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD dan DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD;
- d. Tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi terkait dengan kinerja anggota DPRD dan aparatur Sekretariat DPRD;
- e. Belum optimalnya kualitas pengkajian kebijakan dan pengembangan bahan penyusunan produk hukum Raperda, Peraturan dan Keputusan;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tertentu, yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah.

Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026 yang tersusun dapat dijadikan sebagai langkah penyalarsan tujuan, sasaran dan skala prioritas program dan kegiatan dalam Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul di Sekretariat DPRD selama tahun 2023-2026.

Pada RPD Tahun 2023-2026, ditetapkan 5 (lima) tujuan dan sasaran. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD mempunyai tugas untuk ikut mendukung pencapaian Tujuan ke 4 (empat) yaitu **“TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN TRANSPARAN”** dengan sasaran **“MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN”**.

Pelayanan Sekretariat DPRD bersinergi dengan pelaksanaan tujuan ke-4 dengan sasaran ke-1 yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026, terutama **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan** dengan sasaran yang ditetapkan yaitu **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan** maka ditetapkan tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat yaitu **Terwujudkan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas**. Sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**.

Tabel 2
Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPD dengan
Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH			RENSTRA SEKRETARIAT DPRD		
Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4	5	6
Tujuan ke-4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan”		Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Terwujudnya dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas		Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	Point Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
		Nilai SAKIP			

Sumber data : Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026

1. Strategi dan Arah kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat DPRD mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan efektif dan efisien. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan



memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD telah ditetapkan strategis dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 3
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TUJUAN KE 4 RPD	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN TRANSPARAN		
SASARAN KE - 1 RPD	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		
TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	STRATEGI	KEBIJAKAN
1 Terwujudkan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pengawasan kegiatan kesekretariatan dan keuangan	1. Penyusunan SOP kegiatan yang baik dan benar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur. Peningkatan kualitas, kompetensi dan pemahaman pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Aparatur Sekretariat DPRD melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan mental, 3. bimbingan teknis, kursus dan seminar. 4. Peningkatan pengawasan internal kegiatan kesekretariatan dan keuangan. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kantor dengan optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui kegiatan pemeliharaan aset.
		2. Meningkatkan dukungan layanan dan fasilitasi dalam pelaksanaan	1. Peningkatan koordinasi antar Bagian dalam rangka penyusunan rencana kerja DPRD dan pelaksanaan kegiatan DPRD. 2. Peningkatan kuantitas dan



		tugas dan fungsi DPRD;	kompetensi tenaga Legal Drafter melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan seminar. Peningkatan kualitas dan kompetensi anggota DPRD dalam hal penyusunan produk hukum daerah 4. melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan seminar. Peningkatan kualitas penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah dengan pelaksanaan penyusunan dan pembahasan yang efektif dan efisien. 5. Peningkatan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi anggaran melalui pelaksanaan rapat pembahasan kebijakan anggaran yang efektif dan efisien. Peningkatan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan DPRD melalui pengagendaaan kegiatan kunjungan kerja dan rapat yang lebih jelas dan sistematis.
		3. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan aspirasi masyarakat;	1. Peningkatan sosialisasi dan aksestabilitas website DPRD sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat. 2. Peningkatan kualitas dukungan dan fasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat melalui pendampingan kegiatan reses dan kunjungan kerja dalam daerah. Peningkatan kualitas penghimpunan dan penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD.
		4 Meningkatkan penyampaian informasi kinerja DPRD kepada masyarakat;	1. Peningkatan kualitas dan jangkauan website DPRD sebagai sarana penyampaian informasi kinerja DPRD. 2. Peningkatan kualitas penyusunan bahan publikasi kinerja DPRD.



			Peningkatan penyampaian informasi kinerja kegiatan DPRD melalui optimalisasi kegiatan publikasi melalui media cetak, elektronik dan media online.
--	--	--	---

Sumber data : Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026

2. Program dan Kegiatan Pembangunan

Program dan Kegiatan dan yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 adalah :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
9.	Layanan Administrasi DPRD
B.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
7.	Pembahasan Kerja Sama Daerah
8.	Fasilitasi Tugas DPRD

B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;



2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Point)	95,00

Sumber data : Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD 2023

Pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2023, sesuai dengan Renstra Sekretariat DPRD maka yang menjadi tanggung jawab Sekretaris DPRD adalah adalah terealisasinya sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023, yaitu Meningkatkan Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Point) dengan target 95,00 Point.

Perjanjian kinerja tahun 2023 dilakukan pada awal tahun yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada APBD tahun 2023, beserta pemegang tanggung jawab pada setiap tingkatan. Perjanjian Kinerja Perubahan memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Perubahan APBD tahun 2023.

Walau terdapat perubahan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat namun tidak berakibat pada Perubahan target kinerja sasaran strategis atau tingkat Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini Sekretaris DPRD. Hal ini dikarenakan, pada indikator sasaran strategis yang ditetapkan adalah kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD yang sifatnya menyeluruh tidak secara langsung terkait dengan keluaran atau target kinerja dari setiap sub kegiatan/kegiatan.



Pada tahun anggaran 2023, anggaran Sekretariat DPRD yang tertuang dalam usulan Renja Sekretariat DPRD dan Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 5

Rekapitulasi Anggaran dari Sekretariat DPRD yang Tertuang dalam Usulan RENJA, Perjanjian Kinerja 2023 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Pagu		
		Usulan RENJA	APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24,818,857,277	21.612.519.224	21.829.898.566
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	187,760,370	177.802.500	177.802.500
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,953,087,677	2.799.657.619	2.839.997.261
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	5.370.000	5.370.000
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	335,350,000	152.840.000	194.220.00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,478,370,000	1.839.032.000	1.885.661.000
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469,542,800	355.445.800	339.152.500
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,163,838,630	516.707.005	591.707.005
8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	15,322,319,300	14.806.769.300	14.807.269.300
9.	Layanan Administrasi DPRD	1,027,000,000	942.971.000	942.971.000
B.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	25,968,866,800	12.762.332.200	15.530.348.200
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	850,939,500	308.530.000	308.530.000
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	238,940,000	199.715.000	199.715.000
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	524,580,300	299.132.900	348.437.900
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	8,416,007,000	4.072.848.300	4.466.648.300
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3,729,523,000	1.725.199.000	2.546.380.000
6.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	379,961,000	199.475.000	216.545.000
7.	Fasilitasi Tugas DPRD	11,828,916,000	5.957.432.000	7.444.092.000

Sumber data : Diolah Tim 2024



C. Target Kinerja Tahun 2023 Menurut Renstra

Berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026, target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 adalah :

Tabel 6

Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2023
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Point)	95,00

Sumber Data : Renstra Sekretariat DPRD 2023-2026

Tahun 2023 adalah awal dari Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026, yang merupakan turunan dari RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Pada tahun 2023 ini sasaran strategis Sekretariat DPRD yaitu Meningkatkan Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD dengan indikator Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan satuan Point dengan target kinerja 95,00 Point.

Dukungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat sangat diperlukan agar kinerja DPRD dapat berjalan dengan baik guna menyerap dan melaksanakan aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Barat untuk melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Secara umum Sekretariat DPRD mempunyai tujuan akhir meningkatkan dan mempercepat terwujudnya pelayanan Sekretariat DPRD yang efektif, efisien dan berkualitas melalui pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum di dalam rencana strategis.

Dalam rangka mengukur kualitas kinerja Sekretariat DPRD Lampung Barat guna mengetahui Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Point) maka perlu dilakukan survei pengukuran indeks kepuasan atas pelayanan dan produk dari Sekretariat DPRD kepada pengguna (user) yaitu anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat pada akhir tahun 2023. Pelaksanaan survei ini merupakan amanat Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Lampung Barat Tahun 2023-2026 yang di dalamnya telah ditetapkan indikator-indikator kinerja program, salah satunya adalah kepuasan pengguna layanan.

Berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2017-2022, maka sasaran strategis Sekretariat DPRD adalah Meningkatkan pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan



Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dengan satuan Predikat. Seperti tabel dibawah ini

Tabel 7
Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2017-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Perangkat Daerah tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK

Sumber Data : Renstra Sekretariat DPRD 2017-2022

Pada Renstra Sekretariat DPRD tahun 2017-2022 dan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026, terdapat perbedaan baik pada sasaran strategis, indikator kinerja utama dan juga target kinerjanya, namun secara makna memiliki arti yang sama yaitu memberikan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat.



BAB III
KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD didukung oleh 35 orang PNS dari Sekretaris Dewan, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional sampai dengan staf, dengan latar belakang pendidikan, pangkat dan golongan yang berbeda beda.

Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD pada Tahun 2023 berdasarkan tingkat pendidikan adalah seperti pada Tabel :

Tabel 8

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Pendididikan	Jumlah	Komposisi(%)
1.	SLTA	1 Orang	2,86
2.	Sarjana Muda	0 Orang	0,00
3.	Sarjana / S1	24 Orang	68,57
4.	Pasca Sarjana / S2	10 Orang	28,57
	Jumlah	35 Orang	100,00

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2023

Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD pada Tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin adalah seperti pada Tabel dibawah ini :

Tabel 9

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Komposisi (%)
1.	Pria	25 Orang	71,43
2.	Wanita	10 Orang	28,57
	Jumlah	37 Orang	100,00

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2023

Sedangkan Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD pada Tahun 2023 berdasarkan Golongan adalah seperti pada Tabel dibawah ini :

Tabel 10

JUMLAH DAN KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

No.	Golongan	Jumlah	Komposisi (%)
1.	Golongan IV	4 Orang	11,43
2.	Golongan III	30 Orang	85,71
3.	Golongan II	1 Orang	2,86
	Jumlah	37 Orang	100,00

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2023.

Pengisian formasi jabatan struktural pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat ini menunjukkan keadaan sebagai berikut:

- Sekretaris Dewan, Eselon II/b terisi
- 3 (tiga) Kepala Bagian, Eselon III/a terisi
- 2 (dua) Kepala Sub Bagian, Eselon IV/a terisi.

Berdasarkan komposisi PNS yang dimiliki Sekretariat DPRD, dibandingkan dengan beban kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, masih terdapat kekurangan PNS. Berdasarkan ANJAB yang telah dilakukan masih terdapat kekurangan PNS pada jabatan-jabatan fungsional umum maupun jabatan-jabatan fungsional tertentu. Seperti pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian masih terdapat kekurangan PNS yang memiliki kompetensi yang baik untuk menangani masalah kepegawaian, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan masih sangat memerlukan penambahan PNS yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang baik terkait urusan perisalah persidangan, perancang perundang-undangan dan juga pendamping komisi. Dan pada bagian keuangan khusus di bidang yang menangani perencanaan masih perlu mendapat tambahan personil yang berkualitas untuk menangani beban kinerja perencanaan yang relatif banyak.

B. Analisis Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD. Dimana sarana dan prasarana berupa kendaraan roda empat, roda dua, bangunan gedung, perlengkapan dan peralatan kantor. Dengan adanya sarana dan prasarana yang relatif baik dan lengkap, sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.



C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 2 (dua) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan. Alokasi Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp.37.360.246.766 ,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

Dibandingkan dengan tahun 2022, dimana setelah perubahan Anggaran Sekretariat DPRD adalah Rp.43.142.756.876,- (empat puluh tiga milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) maka anggaran Sekretariat DPRD tahun 2023 mengalami **PENURUNAN**.

Penurunan anggaran ini selain dikarenakan kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit anggaran juga dikarenakan terdapat sub kegiatan yang tidak dianggarkan seperti Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD serta ada beberapa sub kegiatan yang mengalami penurunan volume kegiatan seperti Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dan Fasilitasi Tugas Pimpinan.

Untuk lebih jelasnya Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023, dari APBD sampai dengan Perubahan APBD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 11
Rekapitulasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU	
		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4
A	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	21.612.519.224	21.829.898.566
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177.802.500	177.802.500
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.958.348.600	2.839.997.261
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.370.000	5.370.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	152.840.000	194.220.00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.825.063.250	1.885.661.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	643.457.005	339.152.500
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	643.457.005	591.707.005
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14.539.113.300	14.807.269.300
9	Layanan Administrasi DPRD	942.971.000	942.971.000
B.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.647.512.200	15.530.348.200
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	308.530.000	308.530.000
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	199.715.000	199.715.000
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	299.132.900	348.437.900
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.621.848.300	4.466.648.300
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.481.363.000	2.546.380.000
6	Pembahasan Kerja Sama Daerah	199.475.000	216.545.000
7	Fasilitasi Tugas DPRD	5.537.432.000	7.444.092.000

Sumber data : Diolah Tim 2024

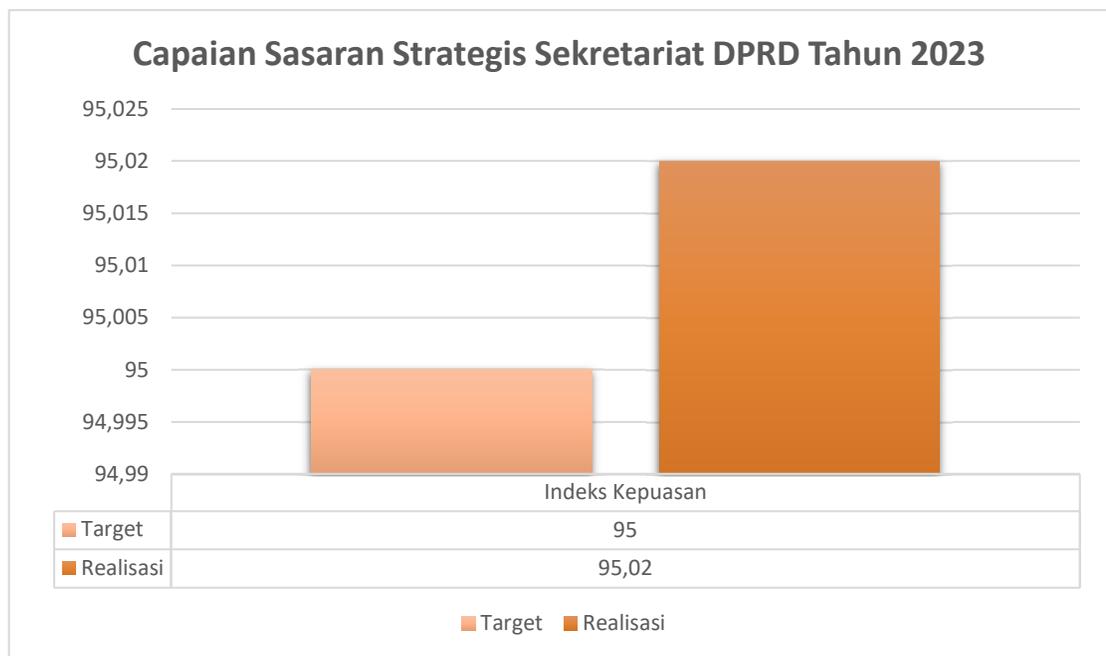
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023, seperti pada tabel dibawah ini :

Diagram 1

Capaian Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2023



Pada tahun 2023, dari sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan yaitu Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Point) dengan target kinerja 95,00 Point terealisasi sebesar 95,02 Point yang berarti terealisasi sebesar 100,02%.

Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Point) dengan realisasi 95,02 Point didapat dari hasil survey kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dalam hal ini PUSAT STUDI HUKUM DAN PEMBANGUNAN (PUSHIBAN) UNIVERSITAS LAMPUNG.

Survey dilakukan dengan memberikan kuisisioner yang terdiri dari 2 Aspek, yaitu :

1. Expected Service (Pelayanan yang Diharapkan) terdiri dari :
 - A. Word of Mouth (Layanan Keseharian) dengan 4 pernyataan
 - B. Personal Needs (Layanan Kebutuhan Pribadi) dengan 5 pernyataan
 - C. Past Experience (Pengalaman Lampau) dengan 3 pernyataan



2. Perceived Service (Pelayanan yang Diterima)

- A. Tangibles (aspek bukti nyata) dengan 8 pernyataan
- B. Reliability (aspek kehandalan) dengan 4 pernyataan
- C. Responsiveness (aspek respon atau daya tanggap) dengan 6 pernyataan
- D. Empathy (aspek kepedulian) dengan 4 Pernyataan
- E. Assurance (aspek kepastian) dengan 5 pernyataan.

Dari 39 (tiga puluh sembilan) pernyataan yang dibagikan kepada 35 (tiga puluh lima) anggota DPRD , setelah dilakukan pengolahan data maka diperoleh hasil Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Point) dengan target kinerja 95,00 Point terealisasi sebesar 95,02 Point yang berarti terealisasi sebesar 100,02%.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan pencapaian sasaran strategis tahun 2021-2022, maka diperoleh data :

Tabel 12
Capaian Sasaran Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021-2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi		Capaian %
				2021	2022	
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Target BAIK	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK	100%

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2021 dan 2022 mencapai 100%. Sedangkan pada tahun 2023 pencapaian kinerja sasaran strategisnya mengalami kenaikan yaitu 100,02%. Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD yang mencapai 100% dari tahun ketahun menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administrasi bagi Anggota DPRD, memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga anggota DPRD merasa puas akan pelayanan yang diberikan.

Kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat sangatlah signifikan baik bagi penilaian kinerja Sekretariat DPRD maupun bagi peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Faktor pendukung terealisasinya sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut antara lain :

1. Adanya dukungan pendanaan kegiatan yang relatif besar.
2. Meningkatnya kemampuan dan kualitas aparatur Sekretariat DPRD sehingga meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur.
3. Meningkatnya pemahaman anggota DPRD terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

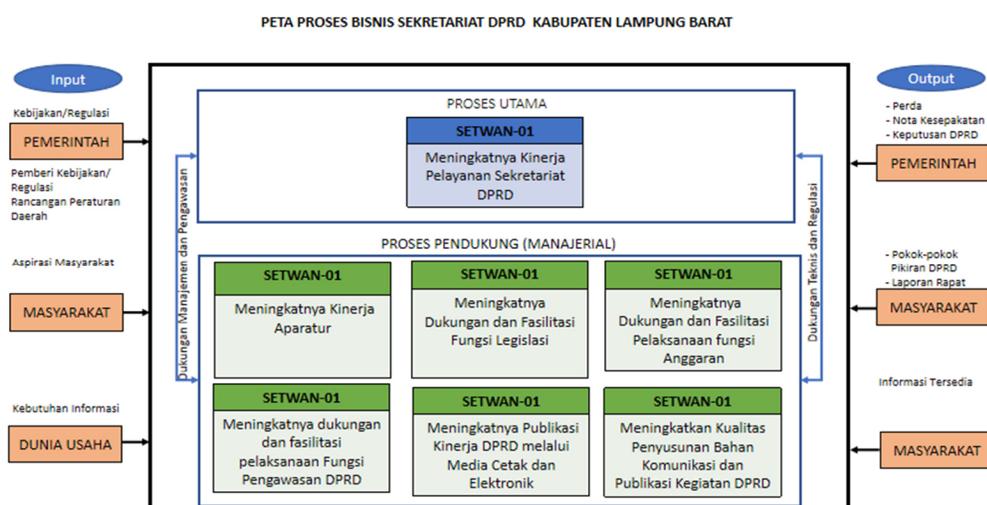
Namun disisi lain masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain :

1. Pelaksanaan Kegiatan Dewan yang tidak sesuai dengan Rencana Program dan Kegiatan Dewan yang telah ditetapkan. Sehingga terkadang fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap kegiatan DPRD tersebut kurang maksimal.
2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung kinerja DPRD.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah :

1. Memberikan pemahaman terhadap Anggota DPRD terkait dengan pelaksanaan kegiatan DPRD yang sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan penyampaian informasi kegiatan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi dan mendukung kinerja DPRD kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kompetensi dan profesional aparatur Sekretariat DPRD.

Gambar 2
PETA BISNIS SEKRETARIAT DPRD





Sekretariat DPRD sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari kerjasama dan pemerta perangkat daerah lain, masyarakat dan juga stake holder yang ada. Seperti dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, maka akan bekerjasama dengan bagian Hukum Sekretariat Daerah serta perangkat daerah terkait. Dalam pemabahasan kebijakan anggaran seperti pembahasan APBD amupun APBD Perubahan maka akan bekerjasama dengan Tim Anggaran Pemerintah De=aerah, BAPEDA, Badan Pengelola Keuangan dan lain-lain. Selain itu sebagai lembaga yang membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD maka tidak terlepas dari masyarakat, baik yang langsung berkunjung ke kantor DPRD atau disaat kunjungan kerja.

B. Perbandingan Kinerja

1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelum

Tabel 13
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Sekretariat DPRD
Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2023	Realisasi	Capaian %	Target Kinerja 2021-2022	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Point	95,00 Point	95,02 Point	100,02 %			
	Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD				BAIK	BAIK	100%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2023 melebihi target yaitu dari target 95,00 Point terealisasi 95,02



point atau 100,02 % dan pada tahun 2021 dan 2022 juga pencapaian sasaran strategis BAIK atau sesuai target 100%. Sehingga walaupun sasaran strategis dan indikator kinerjanya berbeda pada 3 tahun tersebut pencapaian kinerjanya mencapai 100%.

Tahun 2023 adalah awal dari penerapan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Pada tahun 2023 ini sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD dengan indikator Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Point) memiliki target kinerja sebesar 95,00 point.

Dibandingkan dengan tahun 2021-2022, maka target kinerja Sekretariat DPRD mengalami perubahan disesuaikan dengan renstra yang ada. Dimana pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, target kinerja dan realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah :

Berdasarkan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 yaitu **“Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD”** dengan indikator **Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD**, capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 adalah 95,02 Point. Melebihi target sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu 95,00 Point, sehingga realisasi sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 adalah sebesar 100,02%.

2. PERBANDINGAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2023 dengan SEKRETARIAT JENDRAL DPR RI

Sebagai Perangkat Daerah dan juga lembaga yang sama-sama memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada anggota DPR/DPRD, maka indikator kinerja utama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan Sekretariat Jendral DPR RI memiliki kesamaan.

Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat terdapat satu Indikator Kinerja Utama yaitu Point Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan Target Kinerja 95,00 %, dengan realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 95,02 Point atau 100,02%.

Sedangkan pada Sekretariat Jenderal DPR RI terdapat beberapa sasaran strategis yang salah satunya adalah Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI dengan Indikator Kinerja Utama adalah **Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jendral DPR RI** dengan target pada tahun 2023 sebesar 3,26 dengan realisasi sebesar 3,26 atau 100%.

Walau terdapat perbedaan satuan indikator kinerja utama, namun pada intinya sama sama menunjukkan indeks penilaian terhadap kinerja Sekretariat DPR RI dan juga Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat yang menunjukkan tingkat kepuasan anggota DPR/DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPR/DPRD. Dengan realisasi kinerja sama sama memenuhi target yang telah ditetapkan.

3. PERBANDINGAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2023 dengan SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG

Membandingkan pencapaian kinerja antara Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dari sisi Indikator Kinerja Utamanya tidak bisa dilaksanakan. Karena terdapat perbedaan indikator yang ditetapkan. Pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Indikator Kinerja Utama nya adalah PresentasiPeraturan Daerah (PERDA) yang ditetapkan dengan taget tahun 2023 sebesar 80%.

4. BENCHMARKING

Sebagai perangkat daerah pada tingkatan kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati. Namun dalam operasionalnya, Sekretariat DPRD sebagai lembaga yang melayani kebutuhan adminsitrasi Anggota DPRD Kabupaten, harus memiliki standar pelayanan yang baik. Sehingga anggota DPRD Kabupaten akan merasa puas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat DPRD yang berada didaerah dibandingkan dengan Sekretariat Jendral DPR RI yang menangani anggota DPR RI sama sama mengutamakan kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan dari Sekretariat DPRD. Dan berdasarkan hasil Laporan Kinerja Sekjen DPR RI Tahun 2023 maka kepuasan anggota DPR terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD cukup baik. Demikian



juga dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat. Dimana anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat sangat puas dengan pelayanan yang diberikan.

Baiknya pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat ini merupakan hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :



Tabel 14
Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

NO.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE	KETERANGAN
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.829.898.566	21.309.444.260	97,62%	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177.802.500	177.583.500	99,88%	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.839.997.261	2.813.393.133	97,49%	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.370.000	5.370.000	100,00%	-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	194.220.00	193.326.000	99,54%	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.885.661.000	1.882.257.600	99,82%	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.152.500	327.250.996	96,49%	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	591.707.005	572.093.369	96,69%	
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14.807.269.300	14.395.659.462	97,22%	
9	Layanan Administrasi DPRD	942.971.000	942.510.200	99,95%	
B	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	15.530.348.200	15.490.647.490	99,74%	
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	308.530.000	308.305.600	99,93%	



Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	199.715.000	199.715.000	100,00%	
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	348.437.900	341.130.500	97,90%	
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.466.648.300	4.443.304.890	99,48%	
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.546.380.000	2.545.565.800	99,97%	
6	Pembahasan Kerja Sama Daerah	216.545.000	216.273.000	99,98%	
7	Fasilitasi Tugas DPRD	7.444.092.000	7.436.352.700	99,90%	

Sekretariat DPRD pada tahun 2023, melaksanakan 2 (dua) program dan 16 (enam belas) kegiatan dan 59 (Lima Puluh Sembilan) sub kegiatan dengan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp. 37.360.246.766- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) terealisasi sebesar Rp. 36.800.091.750,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 98,50% (Sembilan puluh delapan koma lima puluh persen), atau terdapat SILPA sebesar Rp. 560.155.016,- (lima ratus enam puluh juta seratus lima puluh lima ribu enam belas rupiah).

Diagram 2
Perbandingan Target dan Serapan Anggaran



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dengan penyerapan anggaran sebesar 98,50 % realisasi kinerja berupa pencapaian sasaran Sekretariat DPRD mencapai 100,02%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 1,52%.

Efisiensi anggaran terlihat hampir semua kegiatan walau dalam jumlah yang relatif kecil. Namun ini menunjukkan bahwa untuk pencapaian pelaksanaan kegiatan tidak harus menghabiskan anggaran yang ada.

D. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini didapat dimanfaatkan sebagai :

1. Bahan evaluasi kinerja Perangkat daerah dan individu dalam pelaksanaan pekerjaan.



2. Bahan Laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah
3. Bahan Laporan kinerja dibuat untuk mempermudah manajemen dalam melakukan pengendalian intern, serta untuk menunjukkan bahwa anggaran dibelanjakan secara efisien dan bermanfaat pada kegiatan operasional perusahaan.
4. Laporan digunakan sebagai sumber informasi. **Laporan** dapat memandu perbaikan dalam menyusun rencana kegiatan selanjutnya. Membantu penetapan kebijakan secara cepat. Meningkatkan perkembangan kegiatan di masa yang akan datang.
5. Laporan kinerja merupakan bukti dan wujud pertanggungjawaban atas hasil kinerja yang sudah dilakukan selama waktu yang sudah ditentukan.

E. Survey Kepuasan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat

Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD, maka dalam rangka penilaian apakah pelayanan yang diberikan benar benar berkualitas dan memberikan efek kepuasan kepada yang dilayani dalam hal ini anggota DPRD. Maka perlu dilakukan survey terkait tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Pelaksanaan survey kepuasan anggota DPRD ini melibatkan pihak ketiga dalam hal ini PUSIHBAN (Pusat Studi Hukum dan Pembangunan) UNIVERSITAS LAMPUNG yang melaksanakan survey dengan memberikan kuisioner kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat untuk dapat menjawab pertanyaan terkait survey. Yang hasilnya akan diolah dan menghasilkan **Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD**.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel.

Dari LKjIP Sekretariat DPRD Tahun 2023 tergambar bahwa Sekretariat DPRD mampu mencapai sasaran strategis **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD** dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (point) dengan target kinerja 95,00 Point dan terealisasi 95,02 Point sehingga capaian kinerja sebesar 100,02%. Ini menggambarkan bahwa Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat telah sangat puas dengan kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Sekretariat DPRD pada tahun 2023, melaksanakan 2 (dua) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 59 (Lima Puluh Sembilan) sub kegiatan dengan alokasi Anggaran Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp.37.360.246.766,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) terealisasi sebesar Rp. 36.800.091.750,- (tiga puluh enam milyar delapan ratus juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 98,50% (Sembilan puluh delapan koma lima puluh persen) dan terdapat SILPA sebesar Rp. 560.155.016,- (lima ratus enam puluh juta seratus lima puluh lima ribu enam belas rupiah).

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini dimana pencapaian sasaran strategis melebihi target yang telah ditentukan dikarenakan ada beberapa faktor pendukung, antara lain adanya dukungan anggaran yang relatif besar dan dukungan dari anggota DPRD kabupaten Lampung Barat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas terbatas;
- b. Adanya beberapa pelaksanaan kegiatan DPRD tidak sesuai dengan agenda / penjadwalan / tata kala kegiatan DPRD;
- c. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian.



- d. Sarana prasarana pendukung perlu diperbarui dan ditingkatkan secara kualitas sehingga mendukung kondusifitas kerja kedewanan.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Pelaksanaan Kegiatan Dewan yang tidak sesuai dengan Rencana Program dan Kegiatan Dewan yang telah ditetapkan. Sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan agenda sehingga terkadang pelaksanaan kegiatan berjalan dengan terburu buru dan kurang terlaksana dengan baik.
2. Belum optimalnya pemanfaatan IT untuk meningkatkan pelayanan terhadap Anggota dan Pimpinan DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Solusi

Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, telah dilakukan beberapa langkah antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD terkait dengan pelaksanaan kegiatan DPRD.
2. Meningkatkan koordinasi masing-masing Bagian yang mengelola kegiatan, agar dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban kegiatan agar dapat dilakukan dengan baik, benar dan tepat waktu. Sehingga diharapkan program dan kegiatan yang telah dianggarkan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Meningkatkan penggunaan IT dalam rangka memberikan pelayanan terhadap Anggota DPRD.
4. Mengoptimalkan waktu kerja dan melaksanakan pengawasan secara melekat dan berjenjang